

# DARI PANDEMI KE ENDEMI

Kontribusi Riset IDEAS Dalam Perjuangan  
Negeri Keluar dari Pandemi, 2020-2022

**Yusuf Wibisono dan Tim IDEAS**



# DARI PANDEMI KE ENDEMI

Kontribusi Riset IDEAS Dalam Perjuangan  
Negeri Keluar dari Pandemi, 2020-2022

**Yusuf Wibisono dan Tim IDEAS**



**DARI PANDEMI KE ENDEMI**  
**Kontribusi Riset IDEAS dalam Perjuangan Negeri**  
**Keluar dari Pandemi, 2020 – 2022**  
Copyrighth @ 2023

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN : .....

..... x ..... cm

xiii, 371 halaman

**Tim Penulis**

Yusuf Wibisono

Fajri Azhari

Muhammad Anwar

Meli Triana Devi

Askar Muhammad

Febbi Meidawati

Siti Nur Rosifah

Agung Nugroho

Nuri Ikawati

Ahsin Aligori

Rini Yaumi

**Penerbit**

**Dompot Dhuafa**

**Philanthropy Building, Jl. Warung Jati Barat No.14, Jatipadang, Kec. Ps.  
Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12540**

# Kata Pengantar

Pandemi adalah ujian bagi setiap rezim politik di dunia, terlepas dari afiliasi ideologi-nya. Pandemi menantang setiap rezim politik apakah memiliki kapabilitas untuk membuat kebijakan yang mampu menahan ledakan infeksi virus, untuk melandaikan kurva secepatnya, untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, untuk melindungi kelompok paling rentan, untuk menyelamatkan setiap nyawa warga negara.

Secara menyedihkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling buruk di dunia dalam menghadapi pandemi. Superioritas ekonomi diatas kesehatan terus menjadi kebijakan utama meski berbagai indikator pandemi terus memburuk. Meski kerap disangkal, kegagalan penanggulangan pandemi adalah jelas dan nyata. Berbagai klaim dan jargon gagah tidak mampu menutupi besarnya korban jiwa dan beratnya beban sistem kesehatan nasional akibat pandemi.

Pemerintah terus berkukuh prioritas ekonomi atas kesehatan ketika pandemi semakin mengganas. Ketika lonjakan kasus tak tertahankan seiring adopsi new normal, pemerintah tidak menarik rem darurat (*emergency brake policy*) dengan kembali menerapkan PSBB, terlebih karantina wilayah (*lockdown*). Atas nama kebutuhan tinggi ekonomi, adopsi “*new normal*” terus dipertahankan meski korban pandemi semakin banyak berjatuhan.

Ketika WHO mengumumkan Covid-19 sebagai situasi darurat dunia pada akhir Januari 2020, Indonesia berkukuh dengan keyakinan bebas dari kasus Covid-19, bahkan dengan gagah memberi insentif bagi sektor pariwisata dalam paket stimulus ekonomi 25 Februari 2020. Setelah mengakui kasus Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020, alih-alih mempersiapkan sistem kesehatan nasional secara serius, pemerintah justru kembali menggulirkan stimulus ekonomi pada 13 Maret 2020.

Hanya setelah Covid-19 menyebar cepat ke penjuru negeri, barulah pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat melalui Keppres No. 11/2020 pada 31 Maret 2020, sekaligus memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen penanggulangan Covid-19 sebagaimana PP No. 21/2020. Melalui Perppu No. 1/2020 pada 31 Maret 2020 dan Perpres No. 54/2020 pada 3 April 2020 pemerintah terus mengukuhkan prioritas ekonomi atas kesehatan di tengah pandemi dengan alokasi anggaran pemulihan ekonomi jauh diatas intervensi kesehatan.

Pandemi telah membuka permasalahan struktural yang melandasi demokrasi kita: sistem politik yang terkooptasi oleh mereka yang hanya tertarik untuk mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan semata. Pemilu telah menjadi instrument legal untuk memupuk kekayaan dan kekuasaan oleh mereka yang sejak awal telah berlimpah dengan keduanya.

Jejak pandemi Indonesia adalah jejak hilangnya kesempatan untuk mencegah penyebaran virus sejak dini. Terlalu banyak waktu dan kesempatan yang terbuang oleh penyangkalan, kelalaian dan ketidakpekaan. Jejak pandemi Indonesia adalah jejak kalam hilangnya banyak nyawa, tumbangnya sistem kesehatan nasional dan memburuknya perekonomian.

Kini, per 21 Juni 2023, pemerintah secara resmi melalui Keppres No. 17/2023 telah mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia dan mengubah status faktual Covid-19 sebagai penyakit endemi. Per 20 Juni 2023, Indonesia secara resmi melaporkan 6,81 juta kasus positif dengan sekitar 162 ribu kematian.

Pandemi memberi banyak pelajaran berharga untuk pengelolaan negeri ini di masa depan: tentang lemahnya respon menghadapi krisis, tentang lemahnya kepemimpinan untuk keluar dari krisis, tentang kegagalan mencegah pandemi yang ganas, tentang kekebalan untuk terus memprioritaskan ekonomi di atas keselamatan warga. Pandemi memberi pengajaran penting bagi masa depan, bahwa mempertentangkan kesehatan publik dan keselamatan masyarakat dengan ekonomi adalah sesat pikir yang sangat berbahaya.

Ke depan, tantangan kita tidak semakin mudah. Pemanasan global akan memberikan tantangan yang semakin berat ke depan, baik kejadian-kejadian alam ekstrim maupun perubahan iklim dalam jangka Panjang. Seiring itu, potensi pandemi untuk terulang kembali adalah terbuka lebar. Terdapat puluhan keluarga virus, strain bakteri hingga disease “X” yang belum diketahui asal-usulnya, yang berpotensi memicu pandemi dan penyakit menular global di masa depan. Terkini, dunia kembali diguncang kehadiran varian baru Covid-19, “Eris”, cicit Omicron. Negeri ini selayaknya tidak mengulang kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Semoga.

**Yusuf Wibisono**  
Jakarta, 09 Agustus 2023

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	iv
<b>Bab 1</b> Darurat Covid	1
<b>Bab 2</b> Menahan Ledakan	9
<b>Bab 3</b> Menhadapi Pandemi	19
<b>Bab 4</b> Mudik di Pusaran Covid-19	29
<b>Bab 5</b> APBN Pasca Covid-19	39
<b>Bab 6</b> Pertaruhan New Normal di Tengah Pandemi	49
<b>Bab 7</b> Eksperimen Gagal New Normal	59
<b>Bab 8</b> Pandemi, Resesi dan RAPBN 2021	69
<b>Bab 9</b> Lemah Negeri Diterpa Pandemi	79
<b>Bab 10</b> Intervensi Non Farmasi untuk Pandemi	89
<b>Bab 11</b> Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi	99
<b>Bab 12</b> Usaha Ultra Mikro Perkotaan	109
<b>Bab 13</b> Darurat 1 Juta Kasus Covid-19	119
<b>Bab 14</b> Buruk Gizi di Masa Pandemi	127
<b>Bab 15</b> Setahun Covid-19 Strategi Eliminasi Pandemi	137
<b>Bab 16</b> Katup Pengaman Pandemi	147
<b>Bab 17</b> Keluarga Miskin Dalam Pusaran Pandemi	157
<b>Bab 18</b> Pandemi dan Daya Tahan Keluarga Miskin	167
<b>Bab 19</b> Ketahanan Keluarga Miskin di Masa Pandemi	177
<b>Bab 20</b> Keluarga Miskin dan Bansos di Masa Pandemi	187
<b>Bab 21</b> Darurat 2 Juta Kasud Covid-19	197
<b>Bab 22</b> Keluarga Miskin dan Rokok di Masa Pandemi	203
<b>Bab 23</b> Petaka Gelombang Kedua	213
<b>Bab 24</b> Herd Immunity dan Pandemi	227
<b>Bab 25</b> Melambung Utang di Tengah Pandemi	233
<b>Bab 26</b> Reformasi Bansos di Masa Pandemi	247
<b>Bab 27</b> Pengalaman Ketidakamanan Pandemi	253
<b>Bab 28</b> Mencegah Gelombang Ketiga	265
<b>Bab 29</b> Dilema BDR dan PTM	279
<b>Bab 30</b> Menjadi Miskin di Masa Pandemi	289
<b>Bab 31</b> Menimbang PTM 100%	299
<b>Bab 32</b> Dilema Sekolah di Tengah Wabah	309
<b>Bab 33</b> Tantangan Kemiskinan Pasca Pandemi	315
<b>Bab 34</b> Memindahkan Ibu Kota di Tengah Pandemi	325
<b>Bab 35</b> Cermin Retak Keluarga Muslim Indonesia	335
<b>Bab 36</b> Reformasi Bansos Pasca Pandemi	349

# Ringkasan Eksekutif

1. Pada awal April 2020 (“Darurat Covid-19”, Republika, 1 April 2020), kami memperingatkan Indonesia memasuki masa kritis untuk menahan ledakan infeksi virus. Dibutuhkan perubahan kebijakan yang drastis untuk menahan ledakan infeksi, secepatnya. Desperate times ask desperate measures. Dalam jangka pendek, kami merekomendasikan akselerasi dan penguatan kebijakan karantina wilayah (lockdown) di Jabodetabek demi melindungi 30 juta penduduk Jabodetabek.
2. Pada awal April 2020 (“Menahan Ledakan Covid-19”, Republika, 9 April 2020), kami menyatakan urgensi kebijakan yang lebih tegas dan kuat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di episentrum wabah, demi mencegah eskalasi dan penyebaran virus. PSBB Jakarta tidak memadai. Dalam jangka pendek, kami mendorong secepatnya dilakukan karantina wilayah di Jabodetabek dan adopsi PSBB di seluruh wilayah Jawa lainnya.
3. Pada awal April 2020 (“Menghadapi Pandemi”, Republika, 9 April 2020), kami keras mengkritik fokus pemerintah pada stabilitas dan pemulihan ekonomi jangka pendek. Respon kebijakan pemerintah ini justru akan berdampak buruk pada keberlanjutan fiskal dan ketahanan perekonomian dalam jangka panjang. Kami merekomendasikan agar respon kebijakan menghadapi covid-19 secepatnya beralih dari berbasis “stabilitas dan pemulihan ekonomi” menjadi berbasis “penanggulangan bencana”. Dengan secepatnya berfokus pada penanggulangan bencana, kita akan menyelamatkan banyak nyawa, memulihkan prospek ekonomi jangka panjang, yang akan membuat biaya krisis menjadi jauh lebih kecil. Mencegah eskalasi pandemi secara efektif akan mencegah krisis sosial dan ekonomi, biaya pemulihan ekonomi akan menurun drastis.
4. Pada akhir April 2020 (“Mudik di Pusaran Covid-19”, Republika, 22 April 2020), kami mengkhawatirkan intervensi yang lamban dan tak terarah dalam menghadapi pandemi, terutama jelang fenomena besar seiring datangnya Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri: mudik! Mudik berpotensi meningkatkan eskalasi wabah melalui 2 cara: peningkatan intensitas penyebaran dari episentrum wabah, yaitu Jabodetabek, ke penjuru negeri, dan peningkatan intensitas penyebaran dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan. Selain mendorong pelarangan mudik, kami merekomendasikan karantina wilayah Jabodetabek dan metropolitan utama Jawa lainnya.
5. Pada pertengahan Mei 2020 (“APBN Pasca Covid-19”, Republika, 14 Mei 2020), kami mengkritik Perppu No. 1/2020 dan perombakan APBN 2020 secara signifikan hanya dengan Perpres. Pandemi membuka wajah asli APBN: rendahnya kapasitas fiskal, besarnya beban belanja terikat, defisit anggaran yang masif, dan ketergantungan pada utang yang memuncak. Kami memperingatkan bahaya besar stimulus yang melonjakkan utang secara luar biasa, yang sebagian-nya dibiayai oleh bank sentral. Pandemi telah meruntuhkan dua disiplin makroekonomi terpenting sekaligus: disiplin defisit anggaran 3 persen dari PDB dan independensi bank sentral.

6. Pada pertengahan Juni 2020 (“Pertaruhan New Normal di Tengah Pandemi”, *Republika*, 11 Juni 2020), kami keras memperingatkan langkah pemerintah mendorong adopsi new normal dan memandangnya sebagai sebuah ketergesa-gesaan. Dengan pandemi yang masih jauh dari reda, membuka kembali aktivitas ekonomi dan interaksi sosial adalah sebuah eksperimen yang sangat berbahaya. Mempromosikan ekonomi di tengah pandemi sama dengan membunuh nyawa lebih banyak. Tiada artinya perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi jika hal itu akan membunuh kita. Pertumbuhan ekonomi hanyalah alat, tujuan akhir yang harus dikejar adalah kualitas dan kebahagiaan hidup masyarakat, dimana faktor terpenting yang berkontribusi untuk itu adalah tetap hidup, tidak mati karena pandemi!
7. Pada pertengahan Agustus 2020 (“Eksperimen Gagal New Normal”, *Republika*, 13 Agustus 2020), kami keras mengkritik adopsi new normal yang membuat kasus Covid-19 melonjak. Rendahnya kapasitas testing, tracing and treatment membuat berjalannya aktivitas ekonomi-sosial “secara normal” menjadi langkah yang sangat berbahaya. Kami memperingatkan bahwa harapan pemulihan ekonomi dengan new normal dapat menjadi halusinasi: pertumbuhan akan tetap rendah karena lemahnya permintaan dan daya beli. Masyarakat yang semakin khawatir dan pesimis akan terus menunda pembelian, perjalanan dan konsumsinya.
8. Pada akhir Agustus 2020 (“Pandemi, Resesi dan RAPBN 2021”, *Republika*, 24 Agustus 2020), kami mengkritik respon otoritas fiskal dalam RAPBN 2021 yang cenderung konservatif, tidak ada lompatan besar untuk membenahi pengelolaan APBN secara fundamental di tengah pandemi. Tidak ada transformasi besar untuk memulihkan kesehatan, tidak ada strategi besar untuk membangkitkan ekonomi. APBN tetap dikelola secara mainstream. Pandemi membuka kebalan pengelolaan APBN: belanja terikat, yaitu beban utang dan belanja birokrasi, terus bertahta meski krisis melanda. Ketika kebutuhan terhadap perlindungan sosial dan penyelamatan dunia usaha dari kebangkrutan meningkat drastis, menambah utang secara radikal dengan mudah menjadi pilihan. Tidak terlihat sense of crisis, tidak terlihat terobosan signifikan untuk efisiensi, non-discretionary expenditure tetap tak tersentuh meski pandemi mengharu biru. APBN-pun semakin dalam terbenam dalam kubangan utang.
9. Pada awal September 2020 (“Lemah Negeri Diterpa Pandemi”, *Republika*, 10 September 2020), kami kembali mengkritisi adopsi prematur new normal yang membuat kasus Covid-19 terus melonjak dan membuat beban sistem kesehatan nasional meningkat drastis. Kami memperingatkan bahwa sistem kesehatan nasional mulai menuju batas kapasitasnya, dengan perbedaan kapasitas antar daerah yang tajam. Untuk mencegah tumbanganya sistem kesehatan daerah, kami merekomendasikan pemerintah daerah untuk tidak ragu menarik kebijakan rem darurat (emergency brake policy).
10. Pada awal Oktober 2020 (“Intervensi Non Farmasi Untuk Pandemi”, *Republika*, 8 Oktober 2020), kami mengkhawatirkan penyebaran virus yang kian masif dan persisten, kondisi yang mirip dengan herd immunity. Kami merekomendasikan adopsi intervensi non farmasi skala besar (karantina wilayah) yang terbukti paling efektif menghentikan penyebaran virus, karena-nya manfaat kesehatannya jauh melebihi biaya sosial-ekonominya. PSBB sudah tidak memadai lagi untuk menghentikan pandemi yang telah menyebar rata ke penjuru negeri.



11. Pada awal Desember 2020 (“Pesta Demokrasi Ditengah Pandemi”, *Republika*, 10 Desember 2020), kami menyoroti pelaksanaan pilkada serentak di tengah eskalasi wabah yang kian meningkat. Untuk melaksanakan pilkada dengan aman di tengah pandemi, yang seharusnya menjadi rujukan bukanlah angka kesembuhan, namun jumlah kasus aktif. Dan hal ini jauh dari terpenuhi di Indonesia. Memaksakan pilkada ditengah pandemi yang masih jauh dari terkendali adalah eksperimen yang beresiko sangat tinggi, terutama pilkada di daerah perkotaan.
12. Pada pertengahan Januari 2021 (“Usaha Ultra Mikro Perkotaan: Bertahan di Pusaran Wabah”, *Republika*, 14 Januari 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang pandemi yang memukul masyarakat kelas terbawah, yaitu pelaku usaha ultra mikro, dengan amat keras. Dengan karakter usaha bersifat harian, menjual produk yang langsung dikonsumsi masyarakat, dan bertransaksi tatap muka secara langsung dengan uang tunai, usaha ultra mikro banyak mengalami disrupsi di era pandemi ini. Kebijakan containment dan jatuhnya mobilitas masyarakat, memukul usaha ultra mikro secara signifikan melalui jatuhnya permintaan, terhambatnya operasional usaha, sulitnya memperoleh bahan baku, terhambatnya produksi hingga ketiadaan permodalan. Dalam jangka pendek, usaha ultra mikro membutuhkan bantuan sosial yang intensif untuk bertahan. Pemerintah harus memfokuskan intervensi pada dukungan pemasaran yang memberikan hasil secara cepat bagi usaha ultra mikro.
13. Pada akhir Januari 2021 (“Darurat Sejuta Kasus”, *Republika*, 28 Januari 2021), kami mengkritik prioritas pemerintah yang terus menempatkan ekonomi diatas kesehatan dan enggan melakukan restriksi mobilitas masyarakat untuk menekan penularan virus. Membenturkan intervensi non farmasi dengan kepentingan ekonomi adalah sesat fikir era new normal. Fokus kebijakan di masa wabah adalah mengatasi pandemi secepatnya, agar perekonomian dapat dipulihkan segera. Jika dengan PSBB saja kasus penularan tidak tertanggulangi, terlebih lagi tanpa PSBB. PSBB adalah kebijakan minimal, setengah langkah menuju kebijakan optimal: karantina wilayah. Semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, semakin suram prospek perekonomian.
14. Pada pertengahan Februari 2021 (“Buruk Gizi di Masa Pandemi”, *Republika*, 11 Februari 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang krisis kesehatan lain di era pandemi: memburuknya asupan gizi masyarakat di satu sisi serta terhentinya berbagai layanan kesehatan esensial di sisi lainnya. Di masa pandemi, masalah kesehatan khususnya bagi kelompok rentan seperti anak usia dini, cenderung meningkat dan tidak terdeteksi. Di saat bersamaan, intervensi gizi dari pemerintah justru melemah, seiring penyebaran virus yang semakin masif dan meningkatnya beban sistem kesehatan nasional. Posyandu dan Puskesmas yang merupakan ujung tombak intervensi gizi spesifik, banyak terganggu operasional-nya, terutama di wilayah zona merah pandemi.
15. Pada awal Maret 2021 (“Strategi Eliminasi Pandemi”, *Republika*, 10 Maret 2021), kami keras mengkritik strategi penanggulangan pandemi yang terus berfokus pada pemulihan ekonomi, yang membuat Indonesia terus terjebak pada siklus infeksi virus berulang dengan kerusakan ekonomi yang semakin masif. Kami merekomendasikan pemerintah untuk secepatnya beralih ke strategi “zero-Covid” yang melindungi kesehatan publik sekaligus perekonomian.

Dalam jangka pendek, usaha ultra mikro membutuhkan bantuan sosial yang intensif untuk bertahan. Pemerintah harus memfokuskan intervensi pada dukungan pemasaran yang memberikan hasil secara cepat bagi usaha ultra mikro.

13. Pada akhir Januari 2021 (“Darurat Sejuta Kasus”, Republika, 28 Januari 2021), kami mengkritik prioritas pemerintah yang terus menempatkan ekonomi di atas kesehatan dan enggan melakukan restriksi mobilitas masyarakat untuk menekan penularan virus. Membenturkan intervensi non farmasi dengan kepentingan ekonomi adalah sesat fikir era new normal. Fokus kebijakan di masa wabah adalah mengatasi pandemi secepatnya, agar perekonomian dapat dipulihkan segera. Jika dengan PSBB saja kasus penularan tidak tertanggulangi, terlebih lagi tanpa PSBB. PSBB adalah kebijakan minimal, setengah langkah menuju kebijakan optimal: karantina wilayah. Semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, semakin suram prospek perekonomian.
14. Pada pertengahan Februari 2021 (“Buruk Gizi di Masa Pandemi”, Republika, 11 Februari 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang krisis kesehatan lain di era pandemi: memburuknya asupan gizi masyarakat di satu sisi serta terhentinya berbagai layanan kesehatan esensial di sisi lainnya. Di masa pandemi, masalah kesehatan khususnya bagi kelompok rentan seperti anak usia dini, cenderung meningkat dan tidak terdeteksi. Di saat bersamaan, intervensi gizi dari pemerintah justru melemah, seiring penyebaran virus yang semakin masif dan meningkatnya beban sistem kesehatan nasional. Posyandu dan Puskesmas yang merupakan ujung tombak intervensi gizi spesifik, banyak terganggu operasional-nya, terutama di wilayah zona merah pandemi.
15. Pada awal Maret 2021 (“Strategi Eliminasi Pandemi”, Republika, 10 Maret 2021), kami keras mengkritik strategi penanggulangan pandemi yang terus berfokus pada pemulihan ekonomi, yang membuat Indonesia terus terjebak pada siklus infeksi virus berulang dengan kerusakan ekonomi yang semakin masif. Kami merekomendasikan pemerintah untuk secepatnya beralih ke strategi “zero-Covid” yang melindungi kesehatan publik sekaligus perekonomian. Negara-negara yang keras dan agresif berupaya melenyapkan Covid-19 (zero-Covid strategy), jauh lebih berhasil dalam memerangi virus dengan prospek ekonomi yang cerah dibandingkan negara-negara yang hanya sekedar berupaya mengendalikan pandemi saja. Mengejar target “zero-Covid” memberi hasil kesehatan-ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan “hidup berdamai dengan virus”.
16. Pada awal April 2021 (“Katup Pengaman Pandemi”, Republika, 8 April 2021), kami menunjukkan bahwa di setiap krisis, sektor informal terutama di sektor pertanian, menjadi katup pengaman yang signifikan bagi banyak pekerja sektor formal - modern yang tiba-tiba kini menganggur. Mengolah tanah, mengambil sumber daya dari alam, dan kembali ke kampung halaman, menjadi mekanisme bertahan hidup (survival) di masa pandemi bagi banyak imigran di wilayah metropolitan, termasuk metropolitan terpenting: Jabodetabek. Dengan peran krusial pertanian, baik di masa normal dan terlebih di masa krisis, selayaknya investasi publik diprioritaskan untuk sektor ini, dengan arah kebijakan yang berpihak pada pertanian rakyat di sektor informal-tradisional. Kebijakan pertanian dan pedesaan selama ini yang terfokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan, kredit pertanian, transmigrasi dan income-generating projects skala besar seperti food estate, saatnya ditinjau ulang.

17. Pada pertengahan Mei 2021 (“Keluarga Miskin dalam Pusaran Pandemi”, *Republika*, 12 Mei 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang dampak pandemi terhadap kehidupan keluarga miskin dan bagaimana mereka bertahan melalui pandemi. Pandemi telah menghempaskan jutaan usaha dan menciptakan pengangguran skala besar, termasuk usaha dan pekerja dari keluarga miskin. Disrupsi pada usaha dan pekerjaan keluarga miskin, membuat penghasilan mereka merosot tajam. Jatuhnya penghasilan dan daya beli keluarga miskin telah menciptakan krisis yang serius, bahkan mulai menyentuh kebutuhan paling mendasar: pangan. Selain melakukan coping strategy, keluarga miskin juga banyak tertolong oleh bantuan sosial yang membuat mereka mampu bertahan melewati krisis.
18. Masih di pertengahan Mei 2021 (“Pandemi dan Daya Tahan Keluarga Miskin”, *Republika*, 19 Mei 2021), kami kembali menyampaikan temuan empiris tentang dampak pandemi terhadap keluarga miskin dan bagaimana mereka bertahan. Pandemi telah memperburuk masalah lapangan kerja dan ketenagakerjaan keluarga miskin secara signifikan. Dampak pandemi yang paling dirasakan keluarga miskin adalah jatuhnya usaha, sulitnya mencari pekerjaan baru dan mengalami PHK. Keluarga dan tetangga menjadi modal sosial terpenting keluarga miskin di masa pandemi. Dua respon bertahan utama keluarga miskin, berutang dan meminta bantuan (hibah), sebagian besar dilakukan secara informal berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan tempat tinggal. Kerawanan pangan menjadi krisis paling serius yang dihadapi keluarga miskin di masa pandemi.
19. Pada akhir Mei 2021 (“Ketahanan Keluarga Miskin di Masa Pandemi”, *Republika*, 25 Mei 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang determinan ketahanan keluarga miskin yang terdampak sangat keras oleh pandemi, mulai dari turunnya penghasilan dan terganggunya kebutuhan pangan keluarga, hingga hilangnya pekerjaan, menurunnya tingkat kesehatan dan terlantarnya pendidikan anak. Memahami faktor-faktor yang menentukan ketahanan individu dan berfungsinya keluarga, adalah krusial untuk membantu keluarga menghadapi guncangan dan bangkit dari krisis. Faktor internal penentu ketahanan keluarga yang teridentifikasi adalah sistem keyakinan, pola organisasi dan proses komunikasi. Sedangkan faktor eksternal penentu ketahanan keluarga yang teridentifikasi adalah bantuan sosial dan akses ke sumber daya alam.
20. Pada awal Juni 2021 (“Keluarga Miskin dan Bantuan Sosial di Masa Pandemi”, *Republika*, 10 Juni 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang peran dan cakupan bantuan sosial bagi keluarga miskin di masa pandemi. Temuan kami menunjukkan signifikansi modal sosial bagi ketahanan keluarga miskin, yaitu tata sosial yang kondusif yang memberi mereka perlindungan yang memadai ketika mereka butuhkan. Di sisi lain, temuan kami juga menunjukkan bahwa eksklusi sosial di keluarga miskin di masa pandemi adalah prevalen. Integrasi sosial dan partisipasi politik menjadi krusial untuk kesejahteraan keluarga miskin.

20. Pada akhir Juni 2021 (“Darurat 2 Juta Kasus”, *Republika*, 24 Juni 2021), kami mengkritik lemahnya kepemimpinan nasional dalam melawan pandemi. Lemahnya komunikasi dan edukasi, rendahnya transparansi data dan informasi, serta inkonsistensi kebijakan antar pembuat kebijakan, membuat penanggulangan wabah terus berjalan tanpa arah yang jelas. Penanggulangan wabah hanya sekedar menekan kasus aktif dan menjaga agar sistem kesehatan tidak tumbang, seraya bergantung sepenuhnya pada vaksin untuk berakhirnya pandemi.
22. Pada awal Juli 2021 (“Keluarga Miskin dan Rokok di Masa Pandemi”, *Republika*, 1 Juli 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang pola konsumsi dan pengeluaran rokok keluarga miskin Indonesia di masa pandemi. Pandemi telah menurunkan daya beli keluarga miskin secara drastis, membuat si miskin semakin miskin. Namun krisis tidak menghentikan perokok miskin untuk terus merokok. Di tengah pandemi, perokok miskin keras mempertahankan konsumsi rokok dan, dengan kendala anggaran yang kini lebih terbatas, berusaha mencari keseimbangan baru. Kemampuan perokok miskin untuk terus merokok bahkan di masa pandemi banyak terbantu oleh harga rokok yang murah sehingga terjangkau oleh kelompok miskin dan distribusi penjualan yang masif nyaris tanpa batas dimana sebagian besar jalur distribusi rokok dilakukan melalui jalur ritel tradisional.
23. Pada awal Agustus 2021 (“Petaka Gelombang Ke-Dua”, *Republika*, 12 Agustus 2021), kami menegaskan prediksi dan kekhawatiran kami di awal tahun, pada “Strategi Eliminasi Pandemi”, *Republika*, 10 Maret 2021, tentang resiko penyebaran virus Covid-19 varian baru yang jauh lebih menular, yang 3 bulan kemudian terbukti: serangan gelombang ke-dua. Serangan virus varian delta merebak di Indonesia sejak Juni 2021 dan berpuncak pada Juli 2021. Gelombang ke-2 menjadi kisah kelabu yang membuka tabir gelap: betapa ringkihnya negeri ini melawan pandemi. Hanya di bulan Juli 2021 saja, terjadi 1,2 juta kasus positif dengan 35 ribu kematian! Sistem kesehatan nyaris lumpuh, rumah sakit penuh sesak hingga ke lorong dan parkir, obat dan oksigen sulit didapat, tenaga kesehatan bertumpukan, hingga ambulans antri di pemakaman. Di Juli 2021, rata-rata kasus aktif mencapai 450 ribu, tiga kali lipat dari puncak gelombang ke-1, dan rata-rata BOR (bed occupancy ratio) mencapai 73,8 persen. Angka kematian rata-rata diatas 1.100 kasus per hari!
24. Pada pertengahan Agustus 2021 (“Utopia Kekebalan Kelompok Melalui Vaksinasi”, *Koran Tempo*, 18 Agustus 2021), kami mengkritik strategi pemerintah yang bergantung hanya pada vaksinasi sebagai jalan keluar dari pandemi sebagai pilihan kebijakan yang beresiko tinggi. Kami menunjukkan bahwa vaksinasi untuk herd-immunity dan memutus transmisi virus, untuk kembali ke kehidupan normal, dalam jangka pendek adalah utopia, namun tidak menutup fakta bahwa ia sangat membantu mencegah fatalitas akibat virus. Dengan tertutupnya peluang meraih herd-immunity dari vaksinasi massal, maka intervensi non farmasi adalah signifikan dan akan terus memainkan peranan krusial dalam menekan penularan dan memutus transmisi virus. Intervensi non farmasi skala besar (lockdown) yang dilakukan secara sistematis bersamaan dengan kebijakan containment (testing, tracing and treatment) yang agresif, terbukti paling efektif menghentikan dan memutus transmisi virus.

25. Pada akhir Agustus 2021 (“Melambung Utang ditengah Pandemi”, *Republika*, 25 Agustus 2021), kami menegaskan prediksi dan kekhawatiran kami sejak awal pandemi tentang beban utang pemerintah. Pada “APBN Pasca Covid-19”, *Republika*, 14 Mei 2020, kami telah mengkritik APBN yang terus dikelola secara mainstream di masa pandemi. Sejak APBN 2020, dengan defisit yang masif, ketergantungan anggaran pada utang memuncak. Kami memperingatkan bahaya besar stimulus yang melonjakkan utang secara luar biasa. Pada “Pandemi, Resesi dan RAPBN 2021”, *Republika*, 24 Agustus 2020, kami mengkritik respon fiskal dalam RAPBN 2021 yang konservatif, tidak terlihat sense of crisis, tidak terlihat terobosan signifikan untuk efisiensi, non-discretionary expenditure tetap tak tersentuh meski pandemi mengharu biru. APBN-pun semakin dalam terbenam dalam kubangan utang. Dengan kecepatan yang meningkat pesat pasca pandemi, stok utang pemerintah kami perkirakan akan mendekati Rp 9.800 triliun pada Oktober 2024. Bila pada periode ke-1 Presiden Jokowi (Oktober 2014 – Oktober 2019) stok utang pemerintah bertambah Rp 2.155 triliun, maka pada periode ke-2 beliau (Oktober 2019 – Oktober 2024) kami proyeksikan stok utang pemerintah akan bertambah Rp 5.043 triliun. Kenaikan stok utang pemerintah era Presiden Jokowi ini menjadi sangat luar biasa bila melihat di periode ke-2 Presiden SBY (Oktober 2009 – Oktober 2014) stok utang pemerintah ‘hanya’ bertambah Rp 999 triliun.
26. Pada awal September 2021 (“Reformasi Bansos di Masa Pandemi”, *Republika*, 8 September 2021), kami mendorong reformasi bansos yang kinerjanya sangat buruk di masa pandemi. Dengan pandemi masih jauh dari berlalu, bansos adalah sangat signifikan bagi keluarga miskin untuk bertahan melewati krisis. Dengan beban berat yang dihadapi keluarga miskin di masa pandemi, yang bahkan telah menyentuh kebutuhan paling dasar yaitu pangan, membuat eksistensi bansos menjadi krusial. Menjadi krusial untuk mengintensifkan bantuan sosial secara tepat sasaran dan tepat waktu bagi keluarga miskin, serta membuatnya menjadi regular dan permanen selama pandemi belum berakhir.
27. Masih di awal September 2021 (“Pengalaman Ketidakamanan Pandemi”, *Republika*, 9 September 2021), kami merekam pengalaman ketidakamanan yang dirasakan masyarakat di masa pandemi dan membangun metodologi untuk mengukur skala ketidakamanan yang dirasakan masyarakat tersebut. Dalam rentang 3 bulan antara Juni – Agustus 2021, gelombang ke-dua pandemi Covid-19 yang mengganas secara luar biasa, telah menciptakan begitu banyak duka dan lara anak bangsa. Serangan virus varian delta merebak di Indonesia sejak Juni 2021, berpuncak pada Juli 2021 dan mulai melandai pada Agustus 2021. Duka dan derita yang dialami masyarakat di puncak pandemi yang tak terkendali ini terekam dan tergambar dalam indikator yang dikembangkan IDEAS: skala pengalaman ketidakamanan pandemi (pandemic insecurity experience scale/PIES).

28. Pada pertengahan Oktober 2021 (“Mencegah Gelombang ke-Tiga”, *Republika*, 14 Oktober 2021), kami mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan pemulihan yang sangat luar biasa pasca serangan virus gelombang ke-2. Setelah mengalami kelumpuhan sistem kesehatan, krisis obat dan oksigen, hingga antrian di pemakaman di Juli kelabu, Indonesia pulih dengan cepat dan sangat meyakinkan. Namun situasi pandemi ke depan masih sangat dinamis, ketidakpastian masih sangat tinggi, lengah dan berpuas diri adalah sebuah kesalahan fatal, terlebih bagi negeri yang baru saja dihantam kerasnya serangan virus gelombang ke-2. Resiko terbesar adalah munculnya varian baru, terutama varian yang mampu menghindari kekebalan dari vaksin dan menjadi resisten terhadap vaksin.
29. Pada awal November 2021 (“Dilema BDR dan PTM”, *Republika*, 11 November 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang dilema antara BDR dan PTM seiring puluhan juta anak kembali ke sekolah pasca pandemi kian terkendali. Urgensi pembukaan kembali sekolah telah lama disuarakan berbagai pihak dan telah menjadi konsensus bahwa Belajar dari Rumah (BDR) dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pengganti yang jauh dari sepadan dari pembelajaran normal di sekolah dengan Membuka kembali sekolah adalah keharusan dan tidak terhindarkan di banyak wilayah dengan keterbatasan kemampuan PJJ. Namun merebaknya kluster sekolah seiring PTM, baik kluster PAUD, SD, SMP maupun SMA-SMK, telah menimbulkan kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19. Kembali menutup sekolah tidak terhindarkan jika kasus melonjak, namun hal ini dipastikan akan semakin meningkatkan kerugian bagi peserta didik. Menghadapi kemungkinan terburuk ke depan, menyiapkan desain BDR yang lebih nyaman, menyenangkan, dan terjangkau, menjadi keharusan yang mendesak. Temuan dari survey kami menunjukkan bahwa terdapat peluang BDR semakin diterima peserta didik ketika kelemahan BDR semakin direduksi dan keunggulan PTM semakin banyak diadopsi.
30. Pada akhir November 2021 (“Menjadi Miskin di Masa Pandemi”, *Republika*, 30 November 2021), kami menyampaikan temuan tentang dampak pandemi terhadap kesejahteraan penduduk. Pandemi membuat sebagian besar masyarakat kini semakin menurun tingkat kesejahteraannya: menjadi miskin di masa pandemi. Di masa pandemi, semakin banyak penduduk yang jatuh ke kelas ekonomi lebih rendah. Pandemi tidak hanya membuat kelas bawah terus terjebak dalam kemiskinan, dan bahkan dengan derajat kemiskinan yang semakin dalam, namun juga telah membuat banyak kelas menengah semakin rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Pandemi telah merubah komposisi kelas menengah menjadi lebih rawan secara ekonomi: kelas menengah-atas dengan ketahanan ekonomi yang tinggi mengalami kemerosotan ke kelas menengah-bawah yang rawan terjatuh ke kelas bawah (kelas miskin dan rentan/hampir miskin).
31. Pada pertengahan Desember 2021 (“Menimbang PTM 100%”, *Republika*, 14 Desember 2021), kami menyampaikan temuan empiris tentang pilihan-pilihan pembelajaran ideal di masa pandemi. Adopsi PTM secara penuh (100 persen) yang dimotivasi oleh tingginya tingkat learning loss (hilangnya pengalaman dan capaian belajar) selama 18 bulan pembelajaran dengan BDR (Belajar dari Rumah), mendapatkan dukungan empiris yang kuat.

Pada “Dilema BDR dan PTM”, *Republika*, 11 November 2021, kami telah menyampaikan temuan survei kami yang menguatkan konsensus bahwa BDR dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pengganti yang jauh dari sepadan dari pembelajaran normal di sekolah dengan PTM. Meneruskan BDR secara penuh adalah pilihan yang tidak bijaksana dan merugikan peserta didik secara signifikan. Namun adopsi PTM secara penuh adalah pilihan beresiko tinggi untuk penyebaran virus dan juga bukan sesuatu yang sangat diinginkan dan diminta oleh peserta didik.

32. Pada awal Januari 2022 (“Dilema Sekolah ditengah Wabah”, *Koran Tempo*, 10 Januari 2022), kami merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi adopsi PTM 100%. Berbagai studi menghasilkan konsensus terjadinya penurunan kualitas pendidikan Indonesia secara signifikan dibawah BDR yang diterapkan sejak awal pandemi. Pelaksanaan BDR yang cenderung tidak efektif dan ketimpangan kemampuan PJJ daring yang lebar antar sekolah dan peserta didik, telah menciptakan learning loss (hilangnya pengalaman dan capaian belajar) dan juga learning poverty (hilangnya kemampuan belajar) pada peserta didik, dengan dampak negatif terbesar dialami oleh peserta didik dari kelompok sosial-ekonomi terbawah. Namun dengan merebaknya kluster sekolah seiring PTM terbatas, semakin tingginya mobilitas masyarakat seiring pelonggaran aktivitas sosial-ekonomi, dan ancaman varian baru Covid-19 Omicron, kebijakan PTM 100 persen adalah eksperimen yang beresiko tinggi. Dengan pandemi masih bersama kita, alih-alih terburu-buru mengejar PTM 100 persen, memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan PTM Terbatas serta menyiapkan desain BDR yang lebih nyaman, menyenangkan, dan terjangkau, jauh lebih prioritas dan mendesak.
33. Pada pertengahan Januari 2022 (“Tantangan Kemiskinan Pasca Pandemi”, *Republika*, 13 Januari 2022), kami menyampaikan analisis bahwa pandemi telah melonjakkan permasalahan kemiskinan, jenis dan dimensinya, serta jumlah dan kedalaman insidennya, tidak hanya kelas sosial-ekonomi bawah namun juga kelas menengah. Penanggulangan kemiskinan kini jauh lebih terjal, tidak akan bisa dengan upaya biasa-biasa saja. Mengembalikan kondisi kemiskinan ke tingkat pra-pandemi menjadi tugas yang berat dan panjang. Kinerja penanggulangan kemiskinan ke depan akan banyak bergantung pada pengendalian pandemi, terutama ancaman gelombang ke-3 seiring kehadiran varian Omicron, kualitas pemulihan ekonomi pasca pandemi serta kebijakan afirmatif kepada kelompok miskin, terutama stabilitas harga kebutuhan pokok dan program bantuan sosial.
34. Pada awal Februari 2022 (“Memindahkan Ibukota ditengah Pandemi”, *Republika*, 10 Februari 2022), kami keras mengkritik pemerintah yang berkeras menggulirkan proyek raksasa ditengah pandemi: memindahkan ibu kota. Memindahkan ibukota terjadi di banyak negara, namun tidak ada yang dilakukan di saat krisis besar melanda negara. Megaprojek IKN datang dengan mimpi kota instan yang dibangun dari kekosongan: membangun kota dunia di tengah hutan Kalimantan. Namun menarik sumber daya global dalam jumlah masif ke kota baru adalah mustahil tanpa sejarah komersial kawasan yang panjang, visi keunggulan kota dan arah pengembangan kota yang fokus, kawasan industri dan perdagangan bebas, keberadaan hub transportasi yang besar, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.



Pandemi adalah ujian bagi setiap rezim politik di dunia, terlepas dari afiliasi ideologi-nya. Pandemi menantang setiap rezim politik apakah memiliki kapabilitas untuk membuat kebijakan yang mampu menahan ledakan infeksi virus, untuk melandaikan kurva secepatnya, untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, untuk melindungi kelompok paling rentan, untuk menyelamatkan setiap nyawa warga negara.

Pandemi memberi banyak pelajaran berharga untuk pengelolaan negeri ini di masa depan: tentang lemahnya respon menghadapi krisis, tentang lemahnya kepemimpinan untuk keluar dari krisis, tentang kegagalan mencegah pandemi yang ganas, tentang kebalikan untuk terus memprioritaskan ekonomi di atas keselamatan warga. Pandemi memberi pengajaran penting bagi masa depan, bahwa mempertentangkan kesehatan publik dan keselamatan masyarakat dengan ekonomi adalah sesat fikir yang sangat berbahaya.

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA

